

Implementasi Program Pelatihan Vokasi dalam Mewujudkan Inklusi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

Implementation of a Vocational Training Program in Realizing Social Inclusion for Persons with Disabilities at the People's Welfare Bureau of East Java Province

Putri Anggraeni Cahyaningrum¹, Fitrotun Niswah², Meirinawati³, Neny Ayu Nourmanita⁴

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 May 2026

Revised 25 May 2026

Accepted 30 May 2026

Available online 05 June 2026

Keywords: *Implementasi Program, Pelatihan Vokasi, Inklusi Sosial, Penyandang Disabilitas, Inklusivitas.*

Keywords: *Program Implementation, Vocational Training, Social Inclusion, Persons with Disabilities, Inclusiveness.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pelatihan vokasi dalam mewujudkan inklusi sosial serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas telah membuka akses formal melalui penyelenggaraan pelatihan reguler yang inklusif. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen kelembagaan, koordinasi lintas instansi, sistem pelatihan yang fleksibel, pemanfaatan teknologi, dan dukungan sosial. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan fasilitas aksesibel, minimnya pendampingan, serta belum adanya standar layanan yang secara khusus mengatur pemenuhan kebutuhan peserta penyandang disabilitas. Disimpulkan bahwa

implementasi program pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur telah membuka akses formal bagi penyandang disabilitas, namun prinsip inklusi sosial belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam pelaksanaan program.

ABSTRAK

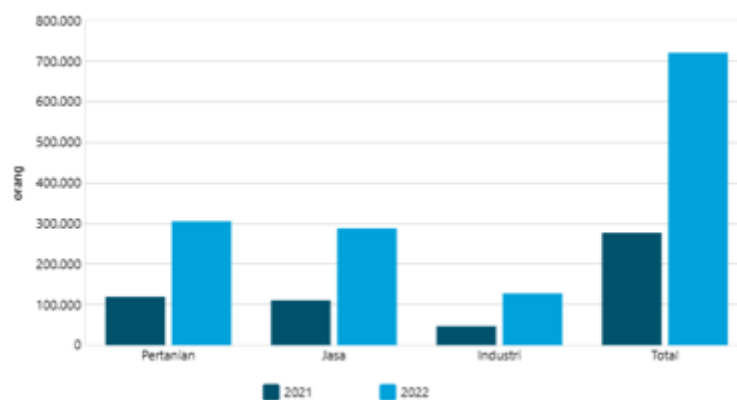
This study aims to analyze the implementation of vocational training programs in promoting social inclusion and to identify the supporting and inhibiting factors affecting their implementation at the Bureau of Public Welfare of East Java Province. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation and were analyzed using an interactive model consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of vocational training programs for persons with disabilities has provided formal access through the provision of inclusive regular training programs. However, the implementation has not fully met the principles of accessibility, participation, equity, and accountability. Supporting factors include institutional commitment, inter-agency coordination, a flexible training system, the utilization of technology, and social support. Meanwhile, inhibiting factors consist of limited accessible facilities, inadequate assistance services, and the absence of service standards specifically designed to accommodate the needs of participants with disabilities. It is concluded that the implementation of vocational training programs for persons with disabilities in East Java Province has expanded formal access for persons with disabilities; however, the principles of social inclusion have not yet been fully institutionalized in program implementation.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan kesempatan kerja yang setara. Padahal, hak penyandang disabilitas untuk memperoleh

pekerjaan, pelatihan kerja, dan partisipasi sosial telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemenuhan hak tersebut sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan ke-8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (UNDP, 2015).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2024), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai lebih dari 22,97 juta jiwa. Meskipun demikian, partisipasi kelompok ini dalam dunia kerja formal masih relatif rendah. Sebagian besar penyandang disabilitas bekerja pada sektor pertanian, jasa, dan kegiatan ekonomi berskala kecil yang umumnya bersifat mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan masih menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas.



Gambar 1. Distribusi Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut Sektor Pekerjaan di Indonesia Tahun 2023

Sumber: Databooks, 2023

Data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih terkonsentrasi pada sektor pertanian dan sektor informal. Rendahnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses kesempatan kerja. Oleh karena itu, pelatihan vokasi menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan keterampilan, daya saing, dan peluang kerja penyandang disabilitas.

Sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, pemerintah telah mengembangkan berbagai program pelatihan vokasi yang inklusif. Namun, implementasi program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Di Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Balai Latihan Kerja (BLK), organisasi penyandang disabilitas, dan dunia usaha. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan aksesibilitas, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kompetensi instruktur dalam pembelajaran inklusif, serta belum tersedianya pedoman teknis yang secara khusus mengatur pelaksanaan pelatihan vokasi inklusif.

Penelitian mengenai pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas telah banyak dilakukan. Pangestuti (2021) menemukan bahwa pelatihan vokasional berperan dalam meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas melalui pengembangan keterampilan kerja. Thalia dan Meirinawati (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pelatihan keterampilan kerja berpengaruh terhadap keberhasilan program pengembangan tenaga kerja. Sementara itu, Iqbal (2024) menegaskan bahwa pelatihan vokasi inklusif memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kesempatan kerja penyandang disabilitas, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan kelembagaan dan aksesibilitas.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas program pelatihan atau pengalaman peserta sebagai penerima manfaat. Kajian yang menganalisis implementasi program dari perspektif pelaksana kebijakan masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelaksana memahami dan menerapkan prinsip-prinsip inklusi dalam proses penyelenggaraan program. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis implementasi Program Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas dari perspektif pelaksana kebijakan menggunakan *Inclusive Policy Implementation Framework* yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP, 2022), yang mencakup dimensi aksesibilitas, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pelatihan Vokasi dalam Mewujudkan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi program pelatihan vokasi dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur sebagai koordinator program pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas, serta pada beberapa instansi dan lembaga pelatihan yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap program pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas. Informan penelitian terdiri atas pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, UPT Balai Latihan Kerja (BLK), instruktur pelatihan, asesor kompetensi, serta peserta pelatihan vokasi penyandang disabilitas. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2023) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan. Analisis difokuskan pada dimensi aksesibilitas, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas dalam implementasi program pelatihan vokasi, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Timur

Program pelatihan vokasi merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kompetensi kerja masyarakat sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam bidang ketenagakerjaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berperan sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan program pelatihan vokasi. Pelaksanaan teknis kegiatan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur.

Sementara itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berperan dalam pendataan dan fasilitasi penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran program.

Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur memiliki peran koordinatif dalam mendukung pelaksanaan program. Biro Kesra tidak bertindak sebagai pelaksana teknis pelatihan, tetapi berfungsi sebagai penghubung antar perangkat daerah serta fasilitator koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Peran tersebut dilakukan melalui sinkronisasi program, komunikasi lintas sektor, dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Program pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur dilaksanakan dalam kerangka pelatihan reguler yang terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kondisi fisik, sensorik, intelektual, maupun mental. Penyandang disabilitas mengikuti proses pendaftaran, seleksi, pelatihan, hingga evaluasi bersama peserta lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, mekanisme pelaksanaan program meliputi tahap sosialisasi, pendaftaran peserta, seleksi administrasi dan wawancara, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi di UPT BLK, evaluasi program, serta tindak lanjut pasca pelatihan berupa sertifikasi kompetensi, penempatan kerja, atau pendampingan usaha.

Pelaksanaan program juga melibatkan dunia usaha, dunia industri, serta lembaga pelatihan sebagai mitra untuk mendukung relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi program pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor yang bertujuan meningkatkan keterampilan, kesempatan kerja, dan inklusi sosial penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur.

Implementasi Program Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan *Inclusive Policy Implementation Framework* Aksesibilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas telah memperoleh akses formal untuk mengikuti pelatihan vokasi melalui mekanisme pendaftaran yang sama dengan peserta lainnya. Keterbukaan akses tersebut menunjukkan adanya pengakuan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan pengembangan keterampilan. Namun, aksesibilitas yang tersedia masih didominasi oleh akses administratif dan belum sepenuhnya didukung oleh akomodasi yang layak.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi aksesibilitas masih berada pada tahap inklusi administratif. Kondisi tersebut terjadi karena belum adanya pedoman teknis yang secara khusus mengatur penyediaan akomodasi yang layak dalam pelatihan vokasi. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan peserta masih bergantung pada fleksibilitas pelaksana dan kondisi lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas belum dilembagakan secara sistemik sebagaimana prinsip aksesibilitas dalam *Inclusive Policy Implementation Framework* (UNDP, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterbukaan akses belum selalu diikuti oleh penyediaan fasilitas dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan peserta penyandang disabilitas.

Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta penyandang disabilitas terlibat aktif dalam proses pembelajaran, praktik pelatihan, dan evaluasi kegiatan. Akan tetapi, keterlibatan peserta dalam proses perencanaan program dan pengambilan keputusan masih terbatas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi yang terwujud masih berada pada level

implementatif, yaitu keterlibatan peserta dalam pelaksanaan program, bukan pada level strategis. Kondisi ini terjadi karena mekanisme pelibatan peserta dalam perumusan program belum tersedia secara formal. Menurut *Inclusive Policy Implementation Framework* (UNDP, 2022), partisipasi yang inklusif tidak hanya menempatkan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi yang terwujud dalam program pelatihan vokasi di Jawa Timur belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan partisipasi masih diukur dari kehadiran dan keterlibatan dalam kegiatan, bukan dari pengaruh peserta terhadap arah kebijakan dan desain program.

Keadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan vokasi dilaksanakan tanpa diskriminasi administratif dan terbuka bagi seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas. Beberapa bentuk penyesuaian metode pembelajaran juga dilakukan untuk membantu peserta mengikuti proses pelatihan.

Meskipun demikian, penyesuaian tersebut masih bergantung pada inisiatif instruktur dan kondisi lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan yang diterapkan masih bersifat adaptif dan belum berbasis kebutuhan individual peserta secara sistematis. Dalam perspektif *Inclusive Policy Implementation Framework* (UNDP, 2022), prinsip keadilan (*equity*) mengharuskan penyedia layanan memberikan dukungan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing individu agar tercapai kesempatan yang setara. Oleh karena itu, implementasi prinsip keadilan dalam program pelatihan vokasi di Jawa Timur belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan proses belajar masih bergantung pada kapasitas dan sensitivitas instruktur, bukan pada standar pelayanan yang berlaku secara universal.

Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung oleh mekanisme pelaporan, evaluasi kegiatan, dan koordinasi melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Berbagai aktivitas administrasi dan pelaporan menunjukkan adanya upaya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program.

Namun demikian, akuntabilitas yang terbangun masih berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif dan belum secara khusus mengukur kualitas inklusi yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan program masih berfokus pada keluaran (*output*) kegiatan dibandingkan dampak sosial yang dirasakan peserta. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas inklusif belum sepenuhnya terimplementasi sebagaimana yang ditekankan dalam *Inclusive Policy Implementation Framework* (UNDP, 2022). Dengan demikian, keberhasilan program lebih banyak dinilai dari jumlah peserta dan pelaksanaan kegiatan dibandingkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dialami penyandang disabilitas setelah mengikuti pelatihan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas

Faktor Pendukung

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama meliputi komitmen lembaga untuk membuka akses pelatihan bagi penyandang disabilitas, koordinasi lintas instansi melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), sistem pelatihan yang fleksibel, sensitivitas instruktur, pemanfaatan teknologi digital, serta dukungan sosial dari keluarga dan organisasi penyandang disabilitas.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan penyandang disabilitas tetap memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, sebagian besar faktor pendukung tersebut masih bersifat kontekstual dan bergantung pada inisiatif individu. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program belum sepenuhnya ditopang oleh sistem kelembagaan yang kuat. Dibandingkan dengan praktik di Kota Surakarta dan Kabupaten Sleman yang telah mengintegrasikan asesmen kebutuhan peserta dan pendampingan ke dalam desain program, implementasi di Jawa Timur masih berada pada tahap administratif adaptif. Dengan demikian, keberhasilan inklusi saat ini lebih banyak didukung oleh fleksibilitas pelaksana dibandingkan mekanisme yang terlembaga secara formal.

Faktor Penghambat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi ketiadaan pedoman teknis pelatihan inklusif, koordinasi lintas instansi yang belum operasional secara penuh, keterbatasan kompetensi instruktur dalam pedagogi inklusif, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya aksesibel, hambatan psikososial peserta, serta minimnya pendampingan pasca-pelatihan.

Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi bukan hanya terletak pada aspek teknis, melainkan juga pada aspek struktural dan kelembagaan. Ketiadaan pedoman teknis menyebabkan tidak adanya standar yang mengatur penyediaan akomodasi yang layak. Di sisi lain, keterbatasan kompetensi instruktur dan sarana pendukung membuat proses pembelajaran inklusif berjalan tidak merata. Akibatnya, pelaksanaan program sangat bergantung pada kemampuan adaptasi individu dan belum mampu menjamin kesetaraan proses secara sistemik bagi seluruh peserta penyandang disabilitas.

Implementasi Program Pelatihan Vokasi dalam Mewujudkan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi aksesibilitas, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas, implementasi Program Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan adanya upaya menuju inklusi sosial melalui pembukaan akses pelatihan, keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran, penyesuaian metode pelatihan, serta mekanisme pertanggungjawaban program.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi program masih didominasi oleh pendekatan administratif dan adaptif. Aksesibilitas yang tersedia belum sepenuhnya didukung oleh akomodasi yang layak, partisipasi peserta masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan, keadilan masih bergantung pada penyesuaian individual, dan akuntabilitas masih berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip inklusi belum sepenuhnya dilembagakan dalam sistem penyelenggaraan program.

Kondisi tersebut terjadi karena belum tersedianya pedoman teknis inklusi yang komprehensif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program. Akibatnya, inklusi yang terwujud lebih banyak bergantung pada fleksibilitas pelaksana, sensitivitas instruktur, pemanfaatan teknologi, dan dukungan sosial informal daripada pada sistem yang dibangun secara formal.

Dengan demikian, program pelatihan vokasi telah berkontribusi terhadap peningkatan akses dan partisipasi penyandang disabilitas, namun belum sepenuhnya menghasilkan inklusi sosial yang substantif. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan inklusif tidak cukup hanya membuka akses partisipasi, tetapi juga memerlukan pelembagaan akomodasi yang layak, penguatan kapasitas pelaksana, standar pedagogi inklusif, dan integrasi layanan lintas

sektor agar penyandang disabilitas memperoleh pengalaman belajar yang setara dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Timur telah mendukung upaya mewujudkan inklusi sosial melalui pemberian akses pelatihan, keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran, serta berbagai bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan program. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa inklusi yang terwujud masih berada pada tahap inklusi administratif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem penyelenggaraan pelatihan vokasi.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses formal bagi penyandang disabilitas telah tersedia, implementasi prinsip aksesibilitas, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas masih bersifat adaptif dan sangat bergantung pada inisiatif pelaksana di lapangan. Kondisi ini menyebabkan kualitas layanan dan pengalaman belajar peserta belum sepenuhnya ditopang oleh mekanisme kelembagaan yang terstandar. Dengan demikian, inklusi yang terwujud lebih mencerminkan praktik penyesuaian yang dilakukan oleh pelaksana program daripada hasil dari sistem yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi program didukung oleh komitmen lembaga, koordinasi lintas instansi, fleksibilitas pelatihan, sensitivitas instruktur, pemanfaatan teknologi digital, serta dukungan sosial dari keluarga dan organisasi penyandang disabilitas. Sebaliknya, ketiadaan pedoman teknis pelatihan inklusif, keterbatasan kompetensi instruktur, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya aksesibel, serta minimnya pendampingan pasca-pelatihan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan inklusi sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi Program Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Timur telah berkontribusi terhadap peningkatan akses dan partisipasi penyandang disabilitas, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, regulasi operasional, dan integrasi layanan yang lebih komprehensif agar tujuan inklusi sosial dapat diwujudkan secara lebih substantif dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pelatihan vokasi yang inklusif untuk memastikan penyediaan akomodasi yang layak dan penyesuaian pembelajaran bagi peserta penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara lebih terstandar. Selain itu, peningkatan kapasitas instruktur dalam pembelajaran inklusif, penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana, serta pengembangan pendampingan pasca-pelatihan perlu dilakukan untuk mendukung keberlanjutan hasil program dan peningkatan kemandirian ekonomi peserta.

Penelitian ini masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama karena fokus penelitian lebih menekankan pada perspektif implementasi program di tingkat penyelenggara. Selain itu, variasi kondisi pelaksanaan pelatihan pada masing-masing lokasi dan ragam kebutuhan penyandang disabilitas dapat memengaruhi pengalaman peserta yang tidak seluruhnya dapat terakomodasi dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi pelatihan vokasi dari perspektif peserta penyandang disabilitas secara lebih mendalam serta mengevaluasi dampak jangka panjang program terhadap peningkatan keterampilan, kesempatan kerja, dan inklusi sosial. Penelitian komparatif antar daerah juga diperlukan untuk

mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi yang inklusif.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Potret penyandang disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (4th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Indriati Amirullah. (2024). Analyzing the impact of collaborative governance models on public service delivery. *Digital Innovation: International Journal of Management*, 1(3), 22–37.
- Iqbal, M. Z. (2024). Social inclusion in technical and vocational education and training (TVET): An assessment on selected partners of the “Skills for Employment Investment Program (SEIP)” project implemented in Bangladesh. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(11).
- Koistinen, M. H., Lord, J. E., Martin, A. H., McClain-Nhlapo, C. V., & Rana Trishna Rajyalaxmi. (2022). *Disability Inclusion and Accountability Framework*.
- Martikalini, C., Alfitri, Sriati, & Thamrin, M. H. (2025). Policy learning as a strategy to strengthen collaborative governance in public services: Theoretical and practical perspectives. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 17(1), 88–109.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiarani, D. (2021). Peran pelatihan vokasi dalam peningkatan kapasitas penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 6(2), 120–135.
- Nasution, R., & Wardhani, S. A. R. H. (2023). Integrasi digital governance dalam tata kelola pemerintahan daerah: Analisis kolaborasi multi-aktor di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Inovasi*, 7(2).
- Neni Nurhayati, & Arief Rahman. (2023). Systematic literature review: Collaborative governance in the public sector. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 11(1), 1–22.
- Pangestuti, D. (2021). Pemberdayaan penyandang disabilitas fisik melalui pelatihan vokasional pada program rehabilitasi sosial. *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 6(1), 2–10.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- Rizqiyah, R. A., & Niswah, F. (2019). Manajemen pelatihan institusional berbasis kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja (Studi pada UPT Pelatihan Kerja Mojokerto). *Publika*, 7(3).
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2020). *Theories of the Policy Process* (4th ed.). Routledge.
- Suryahadi, A., Dewi, R. K., & Al Izzati, R. (2022). Disability and labor market exclusion: Evidence from Indonesia. *Sustainability Science and Resources*, 2(1), 45–77.
- Thalia, N., & Meirinawati, M. (2021). Pelayanan prima program pelatihan keterampilan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Studi pada Program Pelatihan Otomotif). *Publika*, 9(2), 97–108.
- Tri Rahmatina. (2024). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Program Pelatihan Vokasional (Studi di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor)*.
- Tri Setiyarini. (2024). *Strategi dan Tantangan Instruktur dalam Melatih Penyandang Disabilitas*

pada Pelatihan Kerja Inklusif Berbasis Kompetensi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.*

United Nations Development Programme (UNDP). (2021). *Social Inclusion Framework: Leaving No One Behind.*

United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Inclusive Policy Implementation Framework.*

World Health Organization. (2022). *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities.*